

MEMANTIK WIRAUSAHA MUDA DI KOTA INDUSTRI (STUDI PERAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM WIRAUSAHA MUDA PEMULA DI KABUPATEN BEKASI)

Luki Oka Prastio¹, Widodo², Selvi Centia³, Safaranita Nur Effendi⁴

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia¹

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia^{2,3}

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia⁴

E-mail: luki18003@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi upaya pemerintah dalam meminimalisir kompleksitas permasalahan kepemudaan seperti kurangnya partisipasi angkatan kerja pemuda, lemahnya kemampuan kewirausahaan, belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah, dan tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda di Kabupaten Bekasi di samping segudang patologi sosial lainnya di kalangan pemuda. Penelitian ini menggunakan basis analisis peran pemerintah dari Diva (2009) terdiri dari peran regulator, peran fasilitator dan peran katalisator. Tujuan penelitian ini menganalisa peran pemerintah daerah melalui Program Wirausaha Muda Pemula di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kemudian teknik perolehan data menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah melalui Program Wirausaha Muda Pemula belum optimal. Ditinjau berdasarkan peran regulator yang belum mampu menciptakan iklim yang kondusif termanifestasi dari kuota kepesertaan yang sangat sedikit yang diperburuk rendahnya minat wirausaha. Berdasarkan peran fasilitator masih belum adanya akses permodalan dan pendampingan. Terakhir ditinjau dari peran katalisator, dilakukan melalui pemberian pengetahuan dan motivasi, namun terdapat kekurangan seperti lemahnya pemberdayaan, tidak adanya pemberian penghargaan, serta dampak keberlanjutan program yang masih dipertanyakan.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Daerah, Wirausaha Muda Pemula.*

ABSTRACT

This research is motivated by the government's efforts to minimize the complexity of youth problems such as the lack of participation in the youth workforce, weak entrepreneurial skills, incompatible youth policies at the national and regional levels, and the high rate of youth open unemployment in Bekasi Regency, in addition to a myriad of other social pathologies among youth. This study uses the basis of government role analysis from Diva (2009) consisting of the role of regulator,

facilitator and catalyst. The purpose of this study is to analyze the role of the government through the Beginner Young Entrepreneur Program in Bekasi Regency. This research uses qualitative methods, then data collection techniques use literature, observation, interviews. The results of the research show that the government's role through the Beginner Young Entrepreneur Program is not optimal. Viewed based on the role of regulators who have not been able to create a conducive climate, it is manifested from the very small participation quota which is exacerbated by the low interest in entrepreneurship. Based on the role of the facilitator, there is still no access to capital and assistance. Finally, in terms of the role of the catalyst, it is carried out through the provision of knowledge and motivation, but there are deficiencies such as weak empowerment, no awards, and the program's sustainability impact is still questionable.

Keywords: *The Role of Government, Beginner Young Entrepreneurs.*

PENDAHULUAN

Pemuda merupakan generasi penerus yang diharapkan menjadi tonggak kemajuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa (Sudiyo et al., 1997). Begitu pun dalam kancah nasional, dinamika yang ada menggambarkan bahwa kontribusi generasi muda sangat besar dalam proses pembangunan, hal ini terbukti sejak era pergerakan nasional dalam merebut kemerdekaan Indonesia hingga era reformasi, generasi muda menjadi motor penggerak perubahan. Pemuda adalah pelopor perubahan dimanapun berada. Peran pemuda adalah penentu sejarah perjalanan suatu bangsa (Gahung et al., 2017). Sejalan dengan itu Mulyana (2016) mencirikan bahwa pemuda yaitu "Individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Integral dengan itu, Taufik (1974) menjelaskan beberapa karakteristik yang dimiliki pemuda yang menonjol diantaranya, kemurnian idealismenya, keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru, di samping besarnya semangat

pengabdianya, spontanitas dan pengabdianya, Inovasi dan kreativitasnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa "Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun". Realitas aktual menunjukkan bahwa penduduk Indonesia dalam kategori usia muda berada pada porsi yang cukup besar mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Di mana komposisi penduduk berusia 20-24 tahun sebesar 22,98 juta jiwa, kemudian sebanyak 21,75 juta penduduk berusia 25-29 tahun. Sebanyak 20,82 juta penduduk Indonesia berusia 30-34 tahun, sedangkan sebanyak 21,98 juta penduduk berusia 35-39 tahun, lebih lanjut bahwa sebanyak 20,69 juta penduduk berusia 40-44 tahun. Selanjutnya komposisi penduduk berusia 45-49 tahun sebesar 18,71 juta jiwa, dan 16,21 juta penduduk Indonesia berusia 50-54 tahun, serta penduduk berusia 55-59 tahun sebesar 13,22 juta

jiwa. Sementara itu, penduduk lanjut usia di atas 60 tahun mencapai 26,66 juta jiwa (Dirjen Dikcapil, 2021).

Besarnya porsi penduduk usia muda dan rendahnya keperdulian terhadap arah pembangunan pemuda tidak jarang melahirkan sumber masalah sosial yang melanggar hukum, agama, dan norma yang dapat merugikan masyarakat umum (Willis, 2020). Selain itu, menjamurnya budaya permisif, budaya hedonis, dan budaya kebarat-baratan telah melunturkan semangat kepribadian nasional dan nilai-nilai luhur bangsa (Kemenpora, 2009).

Tidak dapat dipungkiri realitas aktual generasi muda saat ini memiliki

banyak tantangan diantaranya masih kurangnya partisipasi angkatan kerja pemuda, masih kurangnya kemampuan kewirausahaan, belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah, tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda. Hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia muda mencapai 18,03% pada Februari 2021. TPT tersebut menunjukkan, dari 100 orang angkatan kerja usia muda terdapat 18 orang yang menganggur. Hal tersebut dapat dilihat dirinci pada tabel, sebagai berikut:

Tabel. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia Muda Tahun 2021

No	Jenis	TPT Usia Muda (Juta)	TPT Nasional (Juta)	Total Angkatan Kerja (Juta)
1	Usia 15 – 24	3,82	8,75	
2	Presentase	43,7 %	6,28 %	21,20

Sumber: Sakernas, 2021

Berdasarkan tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia Muda Tahun 2021, bahwa total angkatan kerja usia 15-24 tahun mencapai 21,20 juta. Artinya terdapat 3,82 juta penduduk di rentang usia tersebut yang sedang tidak bekerja. Jumlah tersebut hampir setengah dari total TPT nasional yang mencapai 8,75 juta atau sebesar 6,26% pada Februari 2021. Jika dipersentasekan maka TPT usia muda mencapai 43,7% dari total TPT nasional (Rizaty, 2021).

Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Karawang bahwa Kabupaten Bekasi sebagai salah satu pusat kota

industri memiliki angka pengangguran yang tinggi (Effendi et al., 2022). Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2020 berdasarkan hasil registrasi penduduk dari dukcapil mencapai 3.113.017 jiwa penduduk dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.444 jiwa per km². Di mana penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah mereka yang digolongkan sebagai penduduk usia kerja berjumlah 2.856.678 orang. Artinya lebih dari 30 persen rasio penduduk dikategorikan sebagai pemuda. Lebih dari itu, dari penduduk usia kerja tahun 2020, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 1.840.666

orang yang terdiri dari 1.628.231 orang bekerja dan 212.435 orang pengangguran terbuka (Bekasi Dalam Angka, 2020).

Besarnya rasio pemuda di Kabupaten Bekasi selaras dengan tingkat pengangguran terbuka yang memerlukan perhatian lebih melalui peran pemerintah termanifestasi dari berbagai kebijakan dan program kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan *leading sector* yang bertugas merealisasikan pembangunan kepemudaan yang seharusnya mampu memfasilitasi segala hal dan kepentingan kepemudaan. Salah satunya mendorong tumbuhnya potensi wirausaha melalui koridor Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian berkaitan dengan peran pemerintah dalam pembangunan kepemudaan sebelumnya sudah dilakukan Mardawia (2017) berjudul Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Kreativitas Pemuda Dalam Meningkatkan Potensi Produk Usaha Lokal Di Kabupaten Kolaka Timur, Putra (2015) dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang, Sidauruk (2013) yang berjudul Peningkatan peran pemerintah daerah Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat, Muchtar (2017) dengan judul Peran Pemerintah Daerah

Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang, Rahmat (2017) yang berjudul Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Pembangunan Pemuda Di Kota Medan, Gahung et al., (2017) yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan beberapa riset terdahulu, penelitian ini berbeda karena berfokus pada peran pemerintah melalui Program Wirausaha Muda Pemula, di samping penelitian serupa di Kabupaten Bekasi belum banyak dilakukan.

KAJIAN PUSTAKA

Peran pemerintah dewasa ini kehidupan masyarakat nyatanya berada pada posisi sentral. Peran diartikan sebagai norma dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Levinson, 1959). Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014:86; Sudarman, 2018:33). Dengan demikian peran merupakan sebuah hal dinamis berkonsekuensi dari sebuah kedudukan atau posisi dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2003:243). Hal tersebut diperkuat oleh Andarmoyo (2012:20) Peran menunjuk kepada beberapa perilaku yang kurang lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara normatif dari seseorang dalam situasi sosial tertentu.

Sebagai basis analisis dalam riset ini, bahwa peran pemerintah yang dikemukakan Diva (2009:15) diantaranya yaitu: 1) Peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan tetap kondusif. Dalam fungsi regulator ini pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Pada fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah, dimana keduanya memiliki wewenang masing-masing. 2) Peran pemerintah sebagai fasilitator, dimana fasilitas yang dapat disediakan pemerintah berupa pelatihan, pemberian bantuan atau melalui subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan atau pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. 3) Peran pemerintah sebagai Katalisator. Artinya pemerintah berperan sebagai stimulan yang dapat membuat terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Keterlibatan pemerintah hanya sebagai faktor mempercepat saja salah satunya dilakukan melalui pemberian penghargaan, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, termasuk permodalan.

Argumentasi kuat yang mendasari penggunaan peran pemerintah yang dikemukakan Diva (2009:15) yaitu tingginya relevansi permasalahan

dengan aspek teoritis yang digunakan. Merujuk pada teori tersebut aspek regulator, fasilitator dan katalisator yang dianggap dapat mengatasi permasalahan wirausaha muda dalam mengembangkan usahanya. Dari segi regulator, pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas kondisi lingkungan beserta mengawasi dinamika perkembangan wirausaha. Dari segi fasilitator, menyediakan ruang kosong serta kesempatan bagi kaula muda untuk bisa berinovasi dalam mengembangkan usahanya. Dari segi, katalisator, dengan cepat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh wirausaha serta membangun partisipasi ataupun perpanjangan tangan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kata wirausaha (*entrepreneur*) berasal dari bahasa Perancis yaitu "*entrepender*", yang berarti mengambil pekerjaan (*to undertake*) (Yunus, 2008). Kemudian *entrepreneur* diartikan juga sebagai orang yang memulai (*the originator*) sesuatu bisnis baru yang berupaya memperbaiki sebuah unit keorganisasian melalui serangkaian perubahan-perubahan produktif (Winardi, 2003). Definisi berbeda diungkapkan Kasmir (2006) yang menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Selaras dengan itu, kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi setiap orang

dalam kehidupan sehari-hari (Suryana & Bayu, 2014). Tidak jauh berbeda Zaharuddin (2010) mendefinisikan wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan.. Sedangkan fungsi kewirausahaan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali dan pemacu perekonomian bangsa (Suryana, 2014).

METODE

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif. Creswell (2022) menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil. Kemudian Sumber data yang ditetapkan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder (Bungin, 2001:129). Informan dalam riset ini terdiri dari Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan peserta Program WMP.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan, observasi kualitatif, wawancara, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual (Moleong, 2007:11). Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini adalah *analisis interaktif* (Creswell, 2015). Dalam model analisis menggunakan tiga komponen seperti reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Haberman, 1994).

Guna memastikan keabsahan teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *trianggulasi* (Patton, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran regulator merupakan fungsi yang sifatnya khas, sebagai regulator pemerintah berfungsi menjaga kondisi lingkungan tetap kondusif. Pasalnya pemerintah merupakan pihak yang menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis (Diva, 2009). Peran pemerintah sebagai regulator dalam konteks ini meliputi: dukungan regulasi, sosialisasi program, rapat koordinasi, dan monitoring evaluasi melalui Program WMP sebagai program pembangunan kepemudaan khususnya dalam penciptaan wirausaha muda di Kabupaten Bekasi.

Meralisasikan kondisi di atas, dukungan regulasi merupakan hal yang krusial dalam pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah (Prastio et al., 2021). Kewenangan pemerintah daerah dalam merealisasikan Program Wirausaha Muda Pemula mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sedangkan pelaksanaan Program WMP di Kabupaten Bekasi didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Merujuk pada Pasal 2 Ayat (3) bahwa kewenangan

Pemerintah Kabupaten Bekasi meliputi: 1) penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten, dan 2) pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten.

Sebagai *leading sector* dalam mendorong iklim berkembangnya wirausaha muda di Kabupaten Bekasi, bahwa melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga melakukan perubahan dan penyesuaian regulasi kepesertaan Program WMP sebagai langkah mengoptimalkan program. Merujuk pada persyaratan Program WMP dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mensyaratkan bahwa peserta diwajibkan memiliki usaha secara perorangan yang telah berjalan minimal dua tahun (dibuktikan dengan laporan keuangan). Dalam realisasinya diminimalisir menjadi satu tahun, pasalnya penerapan dengan kriteria minimal memiliki usaha selama dua tahun secara aktual sangat mempersulit peserta dan mengurangi antusias masyarakat mengitukti Program WMP.

Kondisi eksternal di Kabupaten Bekasi yang condong pada lingkungan industri mendorong sebagian besar minat masyarakatnya menjadi buruh diberbagai perusahaan swasta. Bekasi sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia nyatanya berdampak signifikan terhadap arah matapencaharian penduduknya. Jika

dilihat berdasarkan potensi industri, Kabupaten Bekasi memiliki sebanyak 7.861 perusahaan yang tersebar di sepuluh kawasan industri yang terbangun dengan luas lahan kawasan mencapai 9.496 Ha. Kesepuluh kawasan industri tersebut yaitu: 1) Kawasan Industri Jababeka dengan luas lahan 2.267 Ha. 2) MM2100 Industrial Town BFIE dengan luas lahan 1.700 Ha. 3) GreenLand International Industrial Center (GIIC) dengan luas lahan 1.700 Ha. 4) Kawasan Industri Lippo Cikarang dengan luas lahan 1.645 Ha. 5) MM2100 Industrial Town MMID dengan luas lahan 805 Ha. 6) Kawasan Marunda Center dengan luas lahan 600 Ha. 7) East Jakarta Industrial Park dengan luas lahan 320 Ha. 8) Kawasan Industri Terpadu Indonesia China dengan luas lahan 205 Ha. 9) Bekasi International Industrial Estate dengan luas lahan 200 Ha. Dan 10) Kawasan Industri Gobel dengan luas lahan 54 Ha (BPS Kab. Bekasi, 2022).

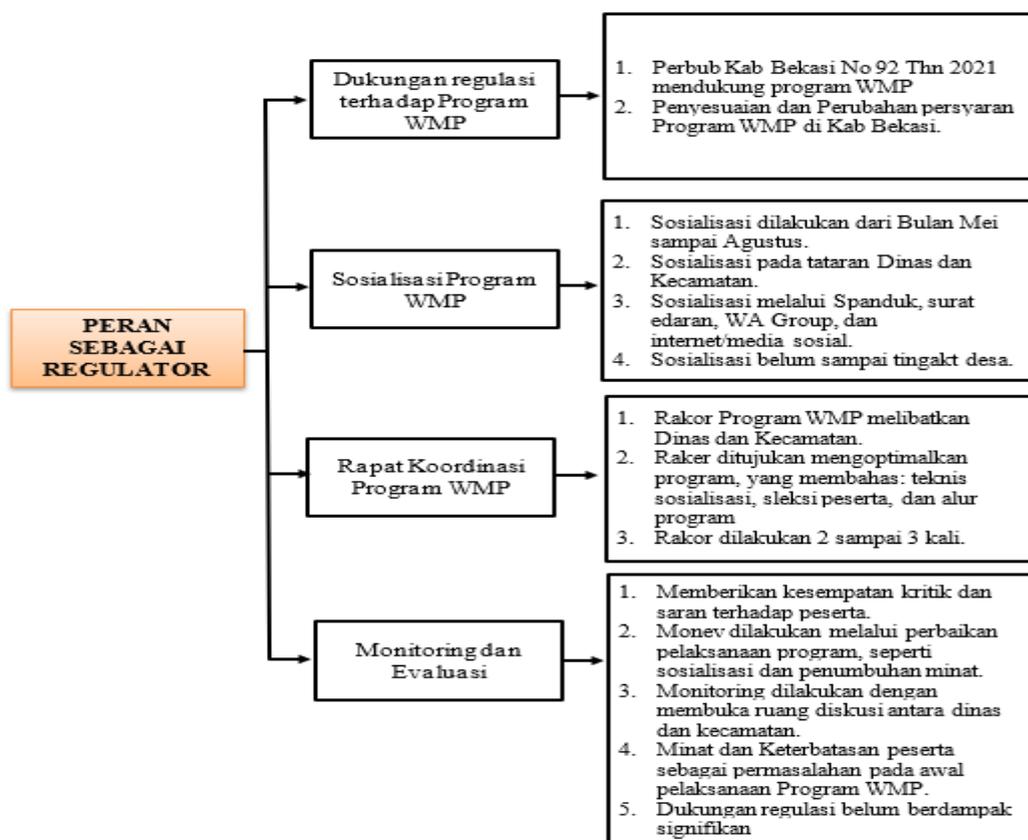
Meskipun sosialisasi Program WMP di Kabupaten Bekasi telah efektif dilakukan melalui surat edaran baik cetak maupun elektronik, poster, maupun melalui media sosial kekinian seperti Instagram selama empat bulan sebelum pelaksanaan program nyatanya belum banyak meningkatkan minat kaum muda untuk berpartisipasi dalam program wirausaha ini. Hal termanifestasi dari sepi peminat Program WMP, meskipun kouta kepesertaan sebanyak 69 orang sudah terpenuhi dari hasil rekrutmen tiap-tiap

kecamatan, nyatatanya masih terdapat kecamatan yang tidak mengirmkan perwakilan pesertanya, artinya dalam kecamatan tersebut tidak ada masyarakat yang mendaftar dalam Program WMP. Nyatanya hal tersebut berkontradiksi dengan tingginya pengangguran terbuka usia produktif (dalam kategori pemuda) di Kabupaten Bekasi mencapai 212.435 orang (Bekasi Dalam Angka, 2020).

Manifestasi peran regulator oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dilakukan melalui upaya koordinasi dengan seluruh kecamatan. Koordinasi sebagai hal krusial karena merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 2000; Hasibuan, 2009). Koordinasi Program WMP dilakkan antara dinas dengan kecamatan, karena pada tingkat kecamatan dilakukan identifikasi dan seleksi awal para calon peserta program ini. Artinya ketepatsasaran dan pemerataan para peserta Program Wirausaha Muda Pemula yag diambil dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bekasi. Koordinasi tersebut dimaksudkan dalam menjaga

sinkronisasi, kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan diantara aktivitas yang saling bergantung/berkaitan. Di samping sebagai upaya pencegahan terhadap timbulnya konflik serta menciptakan efisiensi yang optimal pada berbagai aktivitas yang interdependen melalui kesepakatan yang mengakomodinir seluruh elemen yang berkaitan.

Dukungan implementasi Program WMP di Kabupaten Bekasi pemerintah berperan melalui penyesuaian regulasi, sosialisasi, dan koordinasi, langkah selanjutnya dilakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksana dan peserta Program WMP. Evaluasi terhadap pelaksana dilakukan dengan membuka lebar ruang diskusi antara dinas dengan seluruh kecamatan, hasilnya hambatan utama dalam program ini rendahnya minat peserta serta persyaratan yang dianggap sulit oleh masyarakat. Sedangkan hasil evaluasi program dilakukan melalui pemberian kritik dan saran oleh 69 peserta terhadap pelaksanaan program menunjukkan output program yang belum menyentuh terhadap kebutuhan peserta. Dapat disimpulkan dalam konteks peran pemerintah sebagai regulator belum merjalan secara optimal, guna memberikan kejelasan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator dalam Program WMP

B. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan kepemudaan. Peran pemerintah sebagai fasilitator, dilakukan dengan memfasilitasi pelatihan, pemberian bantuan atau melalui subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan atau pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri (Diva, 2009:15). Fasilitasi yang dilakukan pemerintah dapat dijelaskan berdasarkan identifikasi melalui seleksi kepemudaan, serta pelaksanaan

kewirausahaan Program WMP. Identifikasi sebagai bagian tidak terpisahkan karena merupakan sarana atau cara untuk memelihara hubungan antara fasilitator dengan sasaran (Yooke & Komaruddi, 2006; Azwar, 2013).

Secara faktual Kabupaten Bekasi sebagai kota industri idealnya mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki, besarnya jumlah penduduk sebanyak 3.113.017 jiwa nyatanya selaras dengan besarnya angka pengangguran mencapai 212.435 jiwa (Bekasi Dalam Angka, 2020). Berdasarkan kondisi tersebut Program Wirausaha Muda Pemula layak direalisasikan sebagai solusi

meminimalisir angka pengangguran. Meskipun terdapat tantangan bahwa masyarakat lebih berminat mencari lapangan pekerjaan sebagai pegawai di perusahaan-perusahaan, kondisi tersebut semakin kompleks seiring bertambahnya lulusan baru di tahun berikutnya. Hasil observasi menunjukkan mengapa masyarakat memilih menjadi pekerja di antaranya: **1) tidak semua orang tertarik berbisnis, 2) tidak semua orang bisa mengelola bisnis, 3) resiko berbisnis lebih besar, 4) karyawan memiliki penghasilan tetap, 5) sudah nyaman dengan pekerjaan, dan 6) memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda.**

Guna menentukan ketepatsasaran Program WMP dilakukan identifikasi melalui seleksi terhadap calon peserta, salah satunya memiliki usaha secara perorangan yang telah berjalan minimal dua tahun (dibuktikan dengan laporan keuangan), selain kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Proses tersebut dimulai dari tingkat kecamatan melalui fasilitasi berupa rekomendasi kelayakan peserta. Sulitnya menjadi peserta Program WMP sejalan dengan tidak meratanya peserta yang mewakili kecamatan-kecamatan se Kabupaten Bekasi, dari empat representasi kecamatan yaitu: Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang Timur,

Kecamatan Setu dan Kecamatan Babealan. Diperoleh hasil bahwa Kecamatan Setu dan Kecamatan Babelan menjadi kecamatan dengan peminat paling sedikit dengan mengirimkan hanya satu peserta.

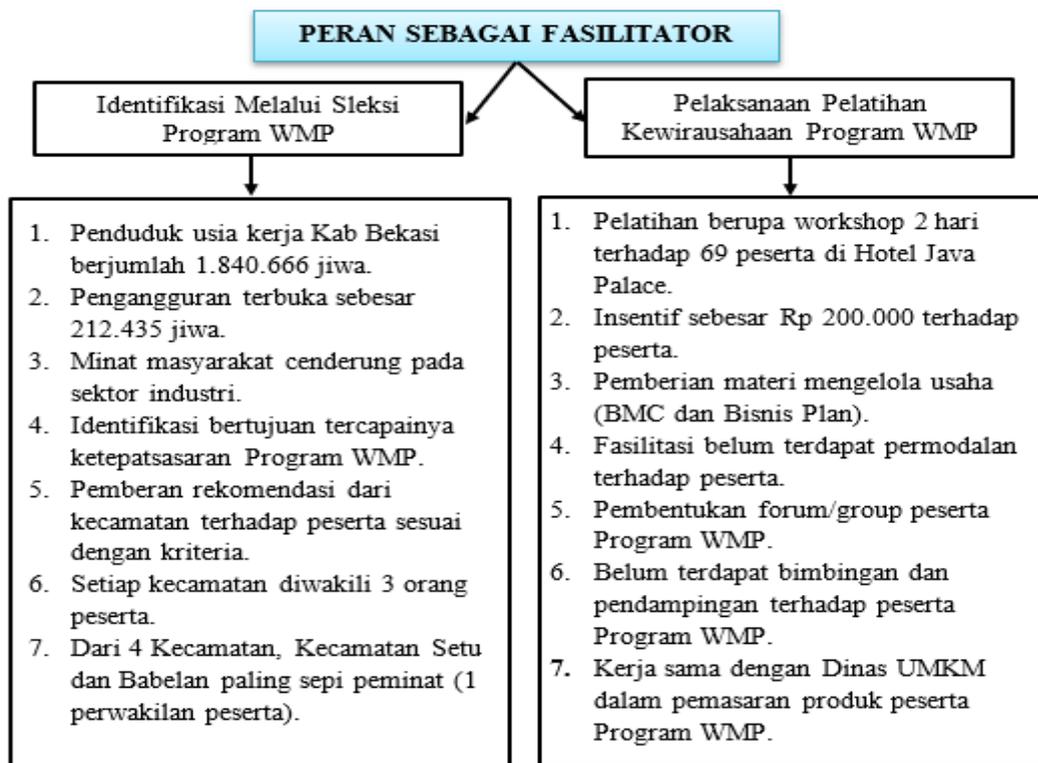
Implementasi berbentuk fasilitasi sebagai sebuah inti dalam Program WMP menjadi titik krusial ketercapaian tujuan program, khususnya dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha muda serta upaya meminimalisir angka pengangguran dikalangan usia produktif. Fasilitasi tersebut dilakukan melalui kegiatan *workshop* selama dua hari berisi berbagai materi dan praktik yang berguna bagi peserta dalam manajemen usahanya. Salah satunya memberikan pemahaman materi BMC dan *Business Plan* yang berguna bagi para wirausaha baru. Sementara bisnis *Model Canvas (BMC)* adalah sebuah sistem yang dapat membantu untuk merancang dan menggambarkan model bisnis secara rinci tetapi mudah untuk dipahami. BMC ini merupakan bentuk strategi manajemen guna merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan dan keuangan.

Bentuk fasilitasi lain berupa kompensasi dana transportasi (uang transport) sebesar Rp 200.000 untuk dua hari pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya menjadikan seluruh peserta dalam sebuah forum *sharing*/berbagi informasi. Dalam konteks pemasaran

produk peserta, fasiltasi dilakkan dengan bmenggandeng Dinas UMKM dan Dinas Perindustrian yang ditujukan sebagai langkah dalam mengembangkan pemasaran produk.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan yang sifatnya esensial dalam fasilitasi Program WMP di Kabupaten Bekasi, yaitu akses permodalan usaha (bukan sekedar insentif atau dana transportasi). Di samping belum adanya pendampingan yang konsisten terhadap peserta dalam

rentang waktu tertentu sebagai *output* nyata mendorong tercapainya wirausaha muda. Pasalnya dalam proses pendampingan tersebut peserta akan dimonitoring, dievaluasi, dan didorong untuk mengembangkan bisnisnya. Kondisi tersebut menegaskan bahwa program tersebut masih bersifat agenda, artinya belum memberikan dampak yang signifikan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperjelas melalui gambar di bawah ini:



Gambar 2 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dalam Program WMP

C. Pemerintah Sebagai Katalisator

Esensi peran katalisator bahwa pemerintah hanya sebagai stimultan dalam mendorong perubahan dan mempercepat proses suatu peristiwa

(Diva, 2009). Keterlibatan pemerintah dalam proses ini tidak bisa secara menyeluruh, tapi hanya sebagai faktor mempercepat melalui pemberian penghargaan, pemberdayaan, termasuk

permodalan. Untuk mendorong perubahan dilakukan stimulus melalui motivasi dan pemberian penghargaan.

Dorongan melalui motivasi terhadap 69 peserta Program WMP memiliki tujuan jangka panjang dalam mempertahankan kestabilan dan meningkatkan produktifitas bidang usaha yang digelutinya, karena seringkali wirausaha muda alih profesi bahkan mudah gulung tikar. Dapat ditegaskan motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan, motivasi bukanlah sesuatu yang siap jadi, tetapi diperoleh dan dibentuk oleh lingkungan (Sukmadinata, 2003; Hasibuan & Silvya (2019); Usman (2013), realitasnya mendorong perubahan pola pikir dan mental wirausaha.

Stimulus terhadap perubahan pola pikir melalau motivasi dilakukan juga dengan menambah memperkaya pengetahuan peserta Program WMP berkenaan faktor penghambat, faktor kegagalan dan keberhasilan berwirausaha. Suntikan motivasi semakin nyata dengan menghadirkan narasumber dari tokoh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.

Peran pemerintah sebagai katalisator dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memberikan penghargaan dan pemberdayaan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan

pemberdayaan belum optimal dilakukan dalam Program WMP, meskipun dilakukan dengan mengandeng Dinas UMKM melalui bazar-bazar pada acara tertentu, banyak dari usaha peserta tidak terakomodir, salah satunya perbengkelan dan Las. Artinya dari total 69 peserta Program WMP, lebih dari setengah masih belum diberdayakan. Meninjau kondisi tersebut, pemberdayaan dalam program pemerintah memiliki posisi strategis, pasalnya pemberdayaan bukan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mencegah kemiskinan, akan tetapi juga dilakukan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik, dengan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat sehingga stabilitas ekonomi dan sosial dapat berlangsung dengan berkelanjutan (Chambers, 2014; Fahrudin, 2012; Suharto, 2009; Theresia, 2018).

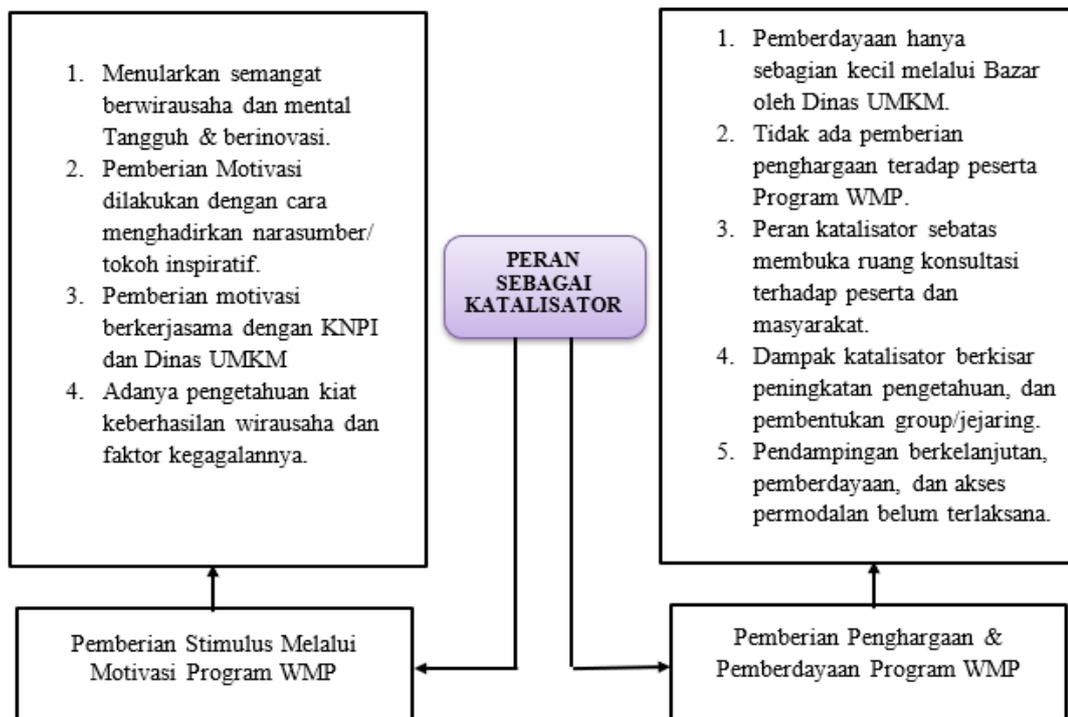
Keterbatasan dan belum optimalnya kemampuan katalisator Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga secara signifikan berpengaruh terhadap capaian maupun dampak yang ditimbulkan dari kemanfaatan Program WMP. Dampak yang dirasakan peserta hanya berkisar peningkatan motivasi, namun berkaitan dengan pemberdayaan, akses permodalan sebagai salah satau aspek penting dari peran tersebut belum terrealisasikan. Pengembangan peserta wirausaha muda pemula yang dalam kategori “belum stabil” bukan hanya memerlukan materi teoritis, melainkan

mutlak memerlukan akses permodalan yang memadai dan evaluasi melalui pembinaan.

Peran pemerintah melalui Program WMP pada tataran pelaksanaannya masih memerlukan adanya kepekaan, kreativitas, dan inovasi dari kepala daerah. Kondisi tersebut terkonfirmasi dengan mengkomparasikan pelaksanaan Program Wirausaha Muda Pemula di berbagai kabupaten/kota lain memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Salah satunya berkaitan dengan jumlah peserta, bahwa peserta di Kabupaten Bekasi berjumlah peserta 69 orang, sedangkan di Kabupaten Lamongan berkisar 100 orang peserta mendapat

materi, yang dikerucutkan menjadi 50 dan 28 peserta terakhir mendapatkan akses permodalan, mentoring, dan pemberdayaan (Indrayanti, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut guna mengoptimalkan *output* Program Wirausaha Muda Pemula dilakukan melalui peningkatan fasilitasi termasuk adanya permodalan dan pendampingan. Dapat dicermati program Wirausaha Muda Pemula idealnya menjadi program yang berkelanjutan. Artinya, diperlukan peningkatan kapasitas dari pelaksana maupun substansi program itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan peran pemerintah sebagai katalisator dapat dilihat seperti di bawah ini.



Gambar 3 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator dalam Program WMP

KESIMPULAN

Peran pemerintah termanifestasi melalui program WMP yang direalisasikan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi belum berjalan optimal. Kondisi tersebut terlihat dari belum kemampuan pemerintah menciptakan iklim yang kondusif terbukti dari banyaknya keterbatasan seperti kuota kepesertaan yang hanya 69 orang, dan belum kemampuan pemerintah meningkatkan minat masyarakat terhadap program. Di samping peran fasilitator belum menyentuh akses permodalan sebagai salah satu permasalahan utama dan belum menyentuh pada usaha pendampingan dan mentoring secara berkala atau berkelanjutan. Artinya program tersebut masih bersifat agenda, artinya belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian peran katalisator dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan suntikan motivasi terhadap peserta, di samping adanya kerjasama dengan Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, dan KNPI sebagai upaya memperluas pemasaran produk. Namun terdapat keterbatasan seperti lemahnya upaya pemberdayaan terhadap peserta, belum adanya pemberian penghargaan, dan dampak keberlanjutan program yang belum jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andarmoyo, S. (2012). *Kebutuhan*

Dasar Manusia: Personal and Environment Hygiene. In Ponorogo: Akedemi Keperawatan Universitas

Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. r2kn.litbang.kemkes.go.id. <https://r2kn.litbang.kemkes.go.id/handle/123456789/76797>

Chambers, R. (2014). *Rural development: Putting the last first*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=zLeOAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=chambers&ots=ma1KNaAna2&sig=m61jOzjpfKY549v3fsmzAcIG3DM>

Creswell, J. W. (2015). *Revisiting mixed methods and advancing scientific practices. The Oxford Handbook of Multimethod and* <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199933624.001.0001/oxfordhb-9780199933624-e-39>

Creswell, J. W. (2022). *Qualitative inquiry and research method: Choosing among five*. In *Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies*.

Diva, G. (2009). *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*. In *Jakarta: Bakrie School of Management*.

- Fahrudin, A. (2012). PEMBERDAYAAN, partisipasi dan penguatan kapasitas masyarakat. In *Bandung: Humaniora*.
- Handoko, T. H. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Perusahaan. In *Edisi kedua, BPFE, Yogyakarta*.
- Hasibuan, M. S. P. (2009). Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Kasmir, D. (2006). Kewirausahaan. In *Raja Grafindo Persada. Jakarta, Indonesia*.
- Miles, M. B., & Haberman, A. M. (1994). Qualitative questionnaire design, interviewing and attitude measurement. In *New York: Continuum*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ovAkBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=patton&ots=ZR210oxHA0&sig=P0qeLaJ6NYpOX_usNsavxDwee04
- Sukmadinata, N. S. (2003). Landasan Psikologi Proses Pendidikan. In *Bandung: Remaja Rosda Karya*.
- Suryana, S., & Bayu, K. (2014). Kewirausahaan: Kiat dan Proses menuju Sukses. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Syamsir, T. (2014). Organisasi & Manajemen. In ... : *Alfabeta Unggul Pangestu Nirmala Multimedia Press ...*
- Taufik, A. (1974). Pemuda dan perubahan sosial. In *LP3S, Jakarta*.
- Usman, H. (2013). Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Keempat). In *Jakarta Timur: Bumi Aksara*.
- Willis, K. (2020). *Theories and practices of development*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DWshEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16&dq=willis&ots=nAv0cbT6D-&sig=JZsvJeW7kC6wG0798QglFO7mj6E>
- Zaharuddin, H. (2010). Menangkap Peluang Usaha. In *CV Dian Anugerah Prakasa, Yogyakarta*.

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal

Azwar, S. (2013). Sikap manusia, teori, dan pengukurannya (Vol. 18). In *Yogyakarta: Pustaka Belajar*.

Effendi, S., Prastio, L. O., & Centia, S. (2022). Collaborative Governance: Contradictions of the National Apprenticeship Program in Karawang Regency-Indonesia. *Social Impact Journal*. <http://journal.goresearch.id/index.php/sij/article/view/1>

Gahung, E. A., Gosal, T., & Singkoh, F. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15433>

Hasibuan, J. S., & Silvya, B. (2019). Pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. *Prosiding Seminar Nasional USM*. <http://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/1696>

Inddrayanti, Indri. (2021). Implementasi dan Efektifitas Program Wirusaha Pemuda Di Kabupaten Tegal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal.

Levinson, D. J. (1959). Role, personality, and social structure in the organizational setting. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*.

<https://psycnet.apa.org/record/1960-02210-001>

Muchtar, R. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang. In *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universtias*

Mulyana, R. (2016). *Fenomena Komunitas Gerakan Pemuda Hijrah di Bandung*. Bandung: Perpustakaan Universitas

Prastio, L. O., Abdillah, A., Nurlia, E., & ... (2021). Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. *Journal of Governance and Local Politic*. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/261>

Putra, T. G. (2015). Peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang. In *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. [journal.unair.ac.id. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmpfa25108fdefull.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmpfa25108fdefull.pdf)

- Rahmat, M. (2017). *Peran Pemerintah Kota Medan dalam Pembangunan Pemuda di Kota Medan*.
- Sidauruk, R. (2013). Peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs*
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/106>
- Soekanto, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. library.stik-ptik.ac.id.
<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=21467&lokasi=lokal>
- Sudarman, A. (2018). Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*.
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/5056>
- Sudiyo, D. S., Nugroho, A., & Suwardi, E. (1997). Sejarah pergerakan nasional Indonesia: dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan. *Journal Of Social Sciences & Humanities "Estoria" Universitas Indraprasta PGRI Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Museum Kebangkitan Nasional*.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. [library.stik-ptik.ac.id](http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7745&lokasi=lokal).
<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7745&lokasi=lokal>
- Theresia, I. (2018). *Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. repository.upi.edu.
<http://repository.upi.edu/id/eprint/45588>
- Winardi, J. (2003). *Entrepreneur dan entrepreneurship*. [repository.unpar.ac.id](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3315/Winardi_142708-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3315/Winardi_142708-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Yooke, K., & Komaruddi, T. S. (2006). *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Yunus, M. (2008). *Islam dan kewirausahaan inovatif*. repository.uin-malang.ac.id.
<http://repository.uin-malang.ac.id/1409/>

Dokumen

- Bekasi, B. (2020). Kabupaten bekasi dalam angka (Bekasi Regenci in Figure) 2020. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi*.
- Kemenpora, R. I. (2009). *Penyajian Data dan Informasi Kementerian*

Pemuda dan Olahraga Tahun **Website**
2009. In *Jakarta: Biro*
Perencanaan Sekretariat
Kementerian.

Rizaty, M. A. (2021). Inilah negara pengguna Instagram terbanyak, Indonesia urutan berapa? Databoks. In <https://databoks.katadata.co.id>.